Analisis Kinerja Petugas Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jeffry Listiyadi [1*], Bambang Irawan [2]
[1,2]Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia
[1]jlistiyadi@gmail.com,[2]bbgirw7980@gmail.com
*** Corresponding Author**

ARTICLE INFO

Article history :
Received : Maret 21, 2025
Revised : Mei 24, 2025
Accepted : Juni 15, 2025

Ketywords :
Disaster Management;
Employees;
Human Resources;
Performance;

Copyright (c) 2026
Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

ABSTRACT

This research is motivated by a phenomenon in The Regional Disaster Management Agency of The Special Capital Region of Jakarta Province that the level of knowledge of officers regarding disasters is still minimal. This research was conducted with the aim of analyzing and evaluating the performance of disaster management officers at The Regional Disaster Management Agency of The Special Capital Region of Jakarta Province in terms of work quality, quantity, timeliness, effectiveness, independence, and work commitment. The research method used is a descriptive qualitative. The results of this study indicate that the performance in terms of work quality, quantity, effectiveness, independence and work commitment has been carried out in accordance with the procedures and performance targets that have been set. However, the aspect of timeliness still needs to be improved. In addition, researcher identified several factors that hinder the performance and the efforts that have been made.

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta memiliki petugas penanganan bencana yang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PJLP merupakan orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam penentuan keberhasilan suatu organisasi, termasuk kinerja petugas penanganan bencana yang merupakan salah satu penentuan keberhasilan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tingkat produktivitas kerja, kualitas hasil kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi indikator penting untuk menilai kinerja petugas penanganan bencana. Data hasil penilaian kinerja petugas penanganan bencana sejak bulan Juli 2023 hingga September 2024 yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD pada bulan Juli 2023 hingga September 2024 memiliki capaian yang cukup baik, di mana tiap bulannya memiliki nilai akhir di atas 95. Namun demikian terlihat naik turunnya capaian kinerja. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam capaian kinerja petugas penanganan bencana. Capaian kinerja yang baik tersebut berbanding terbalik dengan hasil pelaksanaan uji kompetensi petugas penanganan bencana pada bulan Desember 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Petugas Penanganan Bencana pada bulan Desember 2023

No	Nilai Ujian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	>=70	47	5 orang mendapat nilai sempurna (100)
2	< 70	186	
3	-	34	Dinas Luar

Sumber data: Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta

Hasil evaluasi petugas penanganan bencana sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 69,66% petugas penanganan bencana memiliki nilai di bawah 70. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman petugas penanganan bencana terhadap penanggulangan bencana masih minim dan dikhawatirkan berdampak buruk pada kinerja penanganan bencana.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kinerja :** Menurut Robbins dalam Pasolong (2016:176): "Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya."
2. **Indikator Kinerja Karyawan :** Menurut Robbins (2006) dalam Yuniarti, R. et al., (2021:1), terdapat enam indikator kinerja karyawan yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja.
3. **Manajemen Sumber Daya Manusia :** Menurut Sutrisno (2016:6): "Manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi."
4. **Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia :** Menurut Hamali (2018:6), fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengorganisasisan, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.
5. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual penelitian kualitatif merupakan panduan teoritis atau konseptual yang digunakan dalam merancang dan melakukan penelitian kualitatif. Kerangka konseptual membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti serta memperjelas hubungan antara konsep dan variabel yang terlibat dalam penelitian. Kinerja adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan dibebankan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data diantaranya Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis memperoleh data berupa hasil wawancara terbuka kepada 6 (enam) informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Dalam menganalisis kinerja petugas penanganan bencana, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) dalam Yuniarti, R. et al., (2021:1) yaitu:

a. Kualitas Kerja

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Secara keseluruhan, tugas penanganan bencana telah dilaksanakan dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Meski petugas penanganan bencana memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dan tidak semua petugas menguasai teknis, namun dengan adanya pembagian peran antar petugas penanganan bencana maka hal tersebut dapat diatasi."

Selain itu, hasil wawancara dengan Kristian Gottam Marudut Sihombing, S.STP., M.Si. selaku Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan (wawancara tanggal 16 Desember 2024) mengatakan bahwa "Dari sisi pengolahan data dan informasi, sebagian besar tugas pendataan bencana terutama kaji cepat kejadian bencana telah dilaksanakan sesuai dengan

SOP yang berlaku. Sehingga penyampaian informasi bencana pada fase awal kejadian telah dilaksanakan dengan baik."

Hasil studi dokumentasi peneliti terhadap sub indikator "Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur" yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2025 yakni pada kegiatan evakuasi korban tenggelam oleh petugas penanganan bencana BPBD bersama tim SAR gabungan. Dokumentasi berupa foto kegiatan yang dipublikasikan di media sosial BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa petugas penanganan bencana telah melaksanakan evakuasi korban tenggelam dengan memakai alat pelindung diri antara lain helm rescue, kacamata pelindung, jaket pelampung, dan sepatu boot dengan benar.

b. Kuantitas

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Petugas penanganan bencana mampu menyelesaikan seluruh tugasnya dengan baik. Mereka menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas, seperti evakuasi hingga distribusi bantuan, meskipun menghadapi tantangan di lapangan, hal ini dapat diatasi dengan kolaborasi antar lintas sektor."

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa beberapa petugas penanganan bencana sedang mengerjakan tugas tambahan di luar tugas utama penanganan bencana. Tugas tambahan ini diantaranya mendampingi pimpinan pada kegiatan di luar kantor, melaksanakan administrasi surat menyurat, mencuci kendaraan, merapikan gudang, dan kegiatan operasional lainnya.

c. Ketetapan Waktu

Hasil wawancara dengan Vitus Dwi Indarto, S.A.P. selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (wawancara tanggal 19 Desember 2024) mengatakan bahwa "Sebagian besar tugas bisa diselesaikan tepat waktu, tetapi ada kalanya kondisi di lapangan seperti cuaca ekstrem menjadi tantangan tersendiri. Dalam situasi tersebut, petugas tetap berupaya maksimal dengan menyesuaikan strategi agar tugas tetap mendekati target waktu yang telah ditentukan." Hasil studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran mengenai frekuensi kehadiran petugas penanganan bencana yaitu pada bulan November 2024, terdapat keterangan sakit sebanyak 75 hari dan keterangan terlambat sebanyak 7.598 menit.

d. Efektivitas

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Hasil pelaksanaan tugas petugas penanganan bencana sejauh ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari tercapainya indikator utama, seperti evakuasi korban, pendistribusian bantuan dengan tepat waktu, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 1x24 jam. Meskipun terdapat kendala di lapangan, seperti medan yang sulit atau cuaca ekstrem, petugas tetap berhasil menjalankan tugas sesuai prosedur." Berdasarkan data yang bersumber dari Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi DKI Jakarta, capaian realisasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 1x24 jam pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV adalah seluruhnya 100%. Kebutuhan dasar pengungsi 1x24 jam yang terpenuhi sesuai dengan standar kebutuhan dasar pengungsi.

e. Kemandirian

Hasil wawancara terhadap informan Kristian Gottam Marudut Sihombing, S.STP., M.Si. selaku Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan (wawancara tanggal 16 Desember 2024) yang menyatakan bahwa "Pengawasan terhadap petugas penanganan bencana penting dilakukan, terutama untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan tugas mereka. Pengawasan juga membantu memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Petugas penanganan bencana sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa perlu diawasi."

Pendapat lain dari informan Ricky Romansyah selaku Petugas Penanganan Bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta (wawancara tanggal 23 Desember 2024) mengatakan bahwa "Tingkat inisiatif petugas penanganan bencana sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengalaman. Petugas yang terlatih cenderung lebih percaya diri dalam bertindak dan mampu menyesuaikan tindakan berdasarkan situasi di lapangan."

f. Komitmen Kerja

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Kolaborasi antar petugas penanganan bencana merupakan elemen fundamental untuk memastikan keberhasilan penanganan bencana. Dalam situasi darurat, koordinasi antar anggota tim memungkinkan pembagian tugas yang jelas dan efisien. Sejauh ini, kebersamaan yang telah terbangun antar petugas penanganan bencana sudah baik sehingga tidak ada kendala dalam kolaborasi antar petugas penanganan bencana."

Hasil observasi peneliti terhadap sub indikator "Komitmen terhadap Kolaborasi Tim" yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024 menunjukkan kolaborasi antar petugas penanganan bencana dalam melaksanakan kaji cepat kejadian bencana. Ada petugas yang ditugaskan ke lokasi bencana untuk melaksanakan pendataan bencana, ada petugas yang berada di Ruang Pusat Pengendalian dan Operasi untuk melaksanakan pemantauan, dan ada petugas yang berada di gudang logistik untuk bersiap mengirimkan bantuan apabila terdapat pengungsian. Mereka saling berkolaborasi demi terwujudnya penanganan bencana yang cepat dan tepat.

2. Faktor Penghambat Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Jika bicara hambatan di lapangan, tentu banyak yang bisa diutarakan. Namun setiap hambatan tentu ada penyelesaiannya. Salah satu hambatan yang perlu menjadi perhatian yang mempengaruhi kinerja petugas penanganan bencana adalah jumlah petugas penanganan yang dirasa masih kurang, tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang dihadapi. Dengan gaji yang hanya 1 kali upah minimal provinsi, hal ini menjadi tantangan bagi BPBD untuk memperhatikan kesejahteraan petugas penanganan bencana sehingga tidak mempengaruhi semangat kerja dan kinerja petugas penanganan bencana."

Hasil wawancara dengan Vitus Dwi Indarto, S.A.P. selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (wawancara tanggal 19 Desember 2024) mengatakan bahwa "Keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional untuk penumpang dan barang merupakan salah satu masalah di lapangan. BPBD belum memiliki Kendaraan Dinas Operasional untuk penumpang sehingga jika terdapat kunjungan dari anak sekolah yang akan berwisata ke Ruang Literasi Kebencanaan, BPBD masih mengandalkan pinjaman dari Perangkat Daerah lain untuk penjemputan. Sedangkan untuk Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukkan bagi bantuan logistik dirasa masih terbatas."

Hambatan lain diungkapkan oleh Agus Wiyono selaku Komandan Pleton Petugas Penanganan Bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta (wawancara tanggal 23 Desember 2024) yang mengatakan bahwa "Sebenarnya pelaksanaan peningkatan kompetensi sudah dilaksanakan, namun intensitasnya masih perlu ditingkatkan dan untuk peningkatan kapasitas yang bersifat teknis hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sehingga tidak banyak petugas yang menguasai kemampuan teknis. Ini membuat tugas-tugas teknis hanya mengandalkan beberapa orang saja sehingga menghambat kinerja penanganan bencana. Dan lagi, tidak semua petugas penanganan bencana berlatar belakang pendidikan kebencanaan ataupun relawan kebencanaan." Hasil wawancara dengan Kristian Gottam Marudut Sihombing, S.STP., M.Si. selaku Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan (wawancara tanggal 16 Desember 2024) mengatakan bahwa "Dari sisi data dan informasi kebencanaan, hal yang menjadi penghambat adalah aplikasi kebencanaan milik BPBD, Sistem Informasi Manajemen Bencana untuk versi iOS masih belum lengkap. Ini menjadi hambatan

karena semua data dan informasi kebencanaan ada di sana, dan menghambat kinerja petugas yang memakai ponsel dengan sistem operasi iOS."

3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Hasil wawancara dengan Muhamad Thoufiq Hidayatuloh, S.T., M.A. selaku Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi (wawancara tanggal 18 Desember 2024) mengatakan bahwa "Untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas penanganan bencana, BPBD berupaya menambah kekuatan penanganan bencana di luar petugas penanganan bencana dengan menyusun Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2020. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, lurah diamanatkan untuk membentuk Satuan Tugas Pengelola Penanggulangan Bencana di Kelurahan. Jadi penanganan bencana di tingkat kelurahan tidak hanya oleh petugas penanganan bencana. Untuk hambatan gaji petugas penanganan bencana, BPBD telah berupaya menganggarkan iuran kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian BPBD terhadap petugas penanganan bencana. Selain itu, juga dianggarkan makan minum kegiatan lapangan untuk kebutuhan penanganan kedaruratan. Usulan peningkatan besaran gaji dirasa sulit untuk terwujud."

Hasil wawancara dengan Vitus Dwi Indarto, S.A.P. selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (wawancara tanggal 19 Desember 2024) mengatakan bahwa "Untuk mengatasi keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional untuk penumpang, BPBD berupaya membuka peluang penerimaan hibah kendaraan dari perangkat daerah lain. Sedangkan untuk Kendaraan Dinas Operasional untuk barang, BPBD berupaya menambah unit kendaraan pada Tahun 2026."

Upaya lain diungkapkan oleh Agus Wiyono selaku Komandan Pleton Petugas Penanganan Bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta (wawancara tanggal 23 Desember 2024) yang mengatakan bahwa "Untuk mengatasi kapasitas petugas penanganan bencana yang bervariasi, BPBD berupaya melaksanakan peningkatan kapasitas secara berkala bagi petugas penanganan bencana, dan untuk pelatihan teknis dapat diikuti oleh petugas yang memang belum mengikuti pelatihan teknis. Upaya lain yang dilakukan adalah latihan dan simulasi secara berkala."

Hasil wawancara dengan Kristian Gottam Marudut Sihombing, S.STP., M.Si. selaku Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan (wawancara tanggal 16 Desember 2024) mengatakan bahwa "Untuk mengatasi Sistem Informasi Manajemen Bencana yang belum lengkap untuk sistem operasi iOS, BPBD berupaya untuk menganggarkan pengadaan komputer khusus yang mendukung percepatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bencana."

1. Analisis Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menganalisis kinerja petugas penanganan bencana menggunakan teori Robbins (2006) dalam Yuniarti, R. et al., (2021:1) antara lain:

a. Kualitas Kerja

Mengutip dari penelitian terdahulu Mekka, S. et al., (2022) yang menyatakan bahwa kualitas kinerja dinilai dari kemampuan pegawai menghasilkan pekerjaan yang bermutu, memiliki dedikasi kerja yang tinggi dan mampu mengembangkan uraian kerja. BPBD DKI Jakarta menyadari bahwa petugas penanganan bencana memang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun hal ini dapat diatasi dengan pembagian peran antar petugas penanganan bencana. Tidak semua petugas penanganan bencana menguasai teknis. Oleh karena itu, pembagian peran adalah hal yang sangat tepat untuk mengatasi hal tersebut. Petugas penanganan bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP yang jelas, petugas dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan tepat.

b. Kuantitas

Secara umum, petugas penanganan bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta telah mampu menyelesaikan segala tugas yang diberikan secara dengan target volume yang ditentukan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Mangkunegara dalam Rahayu (2019) yaitu kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana.

Dengan kuantitas kerja yang banyak, diharapkan tidak mengurangi kualitas kerja. Hal ini sama dengan pernyataan Sumarsid et al., (2022) dalam jurnalnya yang berjudul Analyze the Factors in Improving Employee Performance yang menyebutkan bahwa "Performance is produced from work done by employees in the form of quality and quantity obtained by the employee in the company" yang artinya kinerja dihasilkan dari hasil kerja yang dilakukan pegawai berupa kualitas dan kuantitas yang diperoleh pegawai dalam perusahaan (organisasi).

c. Ketepatan Waktu

Pada penelitian terdahulu milik Mekka, S. et al (2022), waktu juga dijadikan sebagai indikator kinerja pegawai. Terkait ketepatan waktu petugas penanganan bencana pada BPBD Provinsi DKI Jakarta, petugas penanganan bencana telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, sehingga menjamin pelaksanaan tugas tepat waktu. Selain ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, peneliti juga menganalisis ketepatan waktu kehadiran atau absensi petugas penanganan bencana. Berdasarkan data rekapitulasi absensi petugas penanganan bencana bulan November 2024, terdapat 61 orang yang sakit dengan total hari sebanyak 75 hari serta terdapat 147 orang yang terlambat masuk kerja dengan total jumlah menit keterlambatan sebanyak 7.598 menit (126 jam). Jika dirata-ratakan, dalam sehari terdapat 253 menit keterlambatan. Dengan angka rata-rata keterlambatan per hari yang cukup tinggi, ini merupakan gambaran yang tergolong buruk bagi petugas penanganan bencana.

d. Efektivitas

Menurut Bastian dalam Hayat (2017:72), efektivitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penentuan indikator kinerja pelayanan publik. Meskipun petugas penanganan bencana merupakan penyedia jasa, petugas penanganan bencana memiliki tujuan yang telah ditetapkan melalui sasaran kinerja pegawai yang merupakan rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan telah disepakati. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas penanganan bencana sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan juga terbukti dari hasil studi dokumentasi tentang pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 1x24 jam. Pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024, capaian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi adalah sebesar 100%. Petugas penanganan bencana dinilai telah memanfaatkan sumber daya dengan baik.

e. Kemandirian

Petugas penanganan bencana melaksanakan tugasnya dengan baik meski tanpa pengawasan. Selain kemampuan petugas penanganan bencana bekerja tanpa pengawasan langsung, petugas penanganan bencana juga mampu berinisiatif dalam mengambil tindakan. Meskipun petugas berinisiatif dalam mengambil tindakan di lapangan, mereka tidak akan melenceng jauh dari SOP yang telah ditetapkan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian terdahulu milik Martono, D. et al., (2023) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu hasil penelitiannya adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kinerja pribadi/individu adalah kepercayaan diri.

f. Komitmen Kerja

Petugas penanganan bencana dibagi ke dalam tim atau regu. Oleh karena itu, pelaksanaan penanganan bencana perlu adanya komitmen antar individu untuk saling berkolaborasi antar individu dan antar tim demi terwujudnya tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait komitmen terhadap kolaborasi tim menunjukkan bahwa kolaborasi antar individu dan tim berjalan dengan baik. Nilai organisasi BPBD yakni Siaga, Tanggap, Galang. Secara umum petugas telah berkomitmen dalam menjalankan komitmen organisasi. Dengan dirancangnya SOP sesuai dengan nilai-nilai organisasi, maka pelaksanaan tugas oleh petugas penanganan bencana akan mencerminkan nilai-nilai organisasi.

2. Faktor Penghambat Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penanganan bencana BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa hambatan dalam mewujudkan kinerja petugas penanganan bencana yang optimal. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Jumlah Petugas Penanganan Bencana
b. Besaran Gaji Petugas Penanganan Bencana
c. Keterbatasan Sarana Penanggulangan Bencana
d. Kapasitas Petugas Penanganan Bencana Tidak Merata
e. Belum Lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Bencana Berbasis *iOS*

3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Kinerja Petugas Penanganan Bencana

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi hambatan kinerja petugas penanganan bencana secara berurutan adalah sebagai berikut:

a. Menambah kekuatan penanganan bencana di luar petugas penanganan bencana
b. Membayarkan iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, serta penyediaan makan minum kegiatan lapangan
c. Menambah Sarana Penanggulangan Bencana
d. Peningkatan Kapasitas Petugas Penanganan Bencana dengan Pelatihan dan Simulasi Kebencanaan Berkala
e. Mempercepat pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bencana Berbasis *iOS*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja petugas penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari enam aspek yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja. Kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek kualitas kerja menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan petugas telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek kuantitas menunjukkan hasil yang optimal. Petugas penanganan bencana mampu menyelesaikan segala tugas yang diberikan sesuai dengan target volume yang ditentukan dan tugas tambahan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi sehingga tetap berfokus pada tugas utama yakni penanganan bencana. Kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek ketepatan waktu menunjukkan hasil yang kurang optimal. Pelaksanaan tugas sudah tepat waktu, namun masih banyak petugas penanganan bencana yang terlambat masuk kerja dan tidak masuk kerja dikarenakan sakit. Kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek efektivitas menunjukkan hasil yang optimal. Petugas penanganan bencana melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memanfaatkan sumber daya dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek kemandirian menunjukkan hasil yang optimal. Petugas Penanganan Bencana melaksanakan tugasnya meski tanpa pengawasan pimpinan dan memiliki kesempatan untuk menyalurkan inisiatifnya dalam mengambil tindakan dengan tetap memperhatikan SOP yang ada. Sedangkan kinerja petugas penanganan bencana dilihat dari aspek komitmen kerja menunjukkan hasil yang optimal. Komitmen terhadap kolaborasi tim menunjukkan bahwa kolaborasi antar individu dan tim berjalan dengan baik dan petugas berkomitmen dalam menjalankan nilai organisasi yakni Siaga, Tanggap, dan Galang.

Faktor yang menghambat kinerja petugas penanganan bencana pada BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah kurangnya jumlah petugas penanganan bencana, besaran gaji petugas penanganan bencana yang dinilai masih belum sepadan dengan beban dan risiko kerja, keterbatasan sarana

penanggulangan bencana, kapasitas petugas penanganan bencana tidak merata dan belum lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Bencana berbasis *iOS*.

Upaya mengatasi hambatan kinerja petugas penanganan bencana pada BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah dengan membuat kebijakan yang mengakomodir penambahan kekuatan penanganan bencana di luar petugas penanganan bencana, membayarkan iuran kesehatan dan ketenagakerjaan serta penyediaan makan minum kegiatan lapangan, menambah sarana penanggulangan bencana khususnya Kendaraan Dinas Operasional penumpang dan barang, meningkatkan kapasitas petugas penanganan bencana dengan pelatihan dan simulasi kebencanaan berkala, serta mempercepat pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bencana berbasis *iOS*.

DAFTAR PUSTAKA

Hamali, A. Y. (2018). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Martono, D., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2023). Performance Analysis Of Employees Of The Directorate General Of Teachers And Educational Personnel Ministry Of Education, Culture, Research And Technology. Journal of Economics and Business UBS, 12(5), 3342-3347.

Mekka, S., Nasir, & Wijaya, I. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1(1), 42-56.

Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Rahayu, R. A., Renny, S. P., & Iyus, Y. (2019). Pengaruh Program Occupational Health and Safety terhadap Kinerja Pegawai. Business Management and Entrepreneurship Journal, 1(4), 44-59.

Sumarsid et al. (2022). Analyze The Factors In Improving Employee Performance. International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship, 2(2), 503-513.

Sutrisno. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yuniarti, R. et al. (2021). Kinerja Karyawan (Tinjauan Teori dan Praktis). Bandung: Widina Bhakti Persada.